

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PENDIDIKAN
DIKECAMATAN BULIK TIMUR , KABUPATEN LAMANDAU, KALIMANATAN
TENGAH**

Oleh :

Nama : Fristhy Delviani

NIM : 14010110120031

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id>/ Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

According to law no 32 of 2004 article 4 paragraph 3 , the formation of a territory can be done by the merger of two regions that bersandingan or may be done by means of the segregation of .Including kecamatan bulik the east who also is the result of a part of the kecamatan bulik .It is hoped that the region between will be able to close and improve the service for people , so can not use public services not only warg in the city center but to also to the residents of the outskirts .Especially is education , where education is one of the basic rights of which may be obtained citizen without discrimination .

This research take focus on the impact of the region against the segregation of education in east sub-district bulik.So as to get a description for, writer using qualitative methodology type descriptive.

In this research , seen that the segregation of after it has occurred have been built a lot of infrastructure education , among them are the addition of four units of new junior high school , three pieces of high school or the equivalent level , 3 units of primary school , and some a preschool education .Besides that also have been built land infrastructure that is easy to reach out to the school students whether it is with a motor , ride a bike , or on foot .Unfortunately , there has been no mass transportation that are amenable to access the school students .

Efforts need to be done more serious by the district government lamandau to help children who have access difficult against the school, as for example transport menyediakan school provision of transportation facilities mass and infrastructure improvement army.Besides, also need to be done the recruitment efforts of teachers continuously educator so that the quality of this region not lose compete with educator from other .

regions.Password: the segregation of, areas education bulik sub-district east

PENDAHULUAN

Era Reformasi membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bidang pemerintahan.Masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun merupakan pengalaman penting dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia.Tergulingnya Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya Orde Reformasi yang menuntut dilaksanakannya demokrasi yang merubah tatanan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem

Menurut Verania Andria dan Yulia Indrawati Sari (2002:iii), penerapan Otonomi Daerah berbasis desentralisasi merupakan dasar oleh kemauan untuk menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Implikasi langsung kebijakan ini bahwa kebijakan publik harus banyak bersal dari bawah/masyarakat (*bottom-up*) dan bukan dari atas pemerintah (*top-down*). Keterlibatan masyarakat baik sebagai pelaku maupun subjek dalam proses perencanaan pembuatan kebijakan pemanfaatan sesuatu yang berkaitan harus demokratis dan sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan demikian masyarakat terbuka lebar untuk berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Otonomi Daerah memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien dalam memenuhi berbagai aktifitas kebutuhan

masyarakat di daerah. Pemekaran wilayah lahir sebagai upaya mengatasi permasalahan di daerah melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah atau lebih. Pemekaran wilayah bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di ada di daerah antara lain meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, meningkatkan kemandirian dan ketertiban, menciptakan kemandirian daerah dalam mengelola perekonomian dengan implikasi agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara Pusat dan Daerah. Setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing yang harus diselesaikan dan Pemerintah Pusat merumuskan beberapa solusi yang salah satunya ialah pemekaran wilayah.

Alternatif pemecahan masalah dengan mengacu pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Di pasal 4 ayat (3) “pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, masing-masing Pemerintah Daerah dapat memecah atau memekarkan wilayahnya yang dirasa cukup mampu.

Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur serta mengurus sendiri pelaksanaan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Wewenang ini mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.”

Otonomi Daerah dicanangkan untuk mempercepat Pembangunan¹, disamping menciptakan keseimbangan Pembangunan Daerah di Indonesia. Kebijakan yang sentralistik dampaknya sudah bisa diketahui bahwa terlihat adanya ketimpangan antar daerah dan terlihat jelas perbedaan atau ketimpangan pembangunan Jawa dan Luar Jawa.

Keanekaragaman permasalahan yang terjadi di Indonesia, baik dari permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pemerataan penduduk dan permasalahan pelayanan publik di daerah. Ketimpangan ini menunjukkan belum meratanya pembangunan antara daerah yang berdekatan langsung dengan Pusat Pemerintahan dan daerah yang berada jauh di pelosok negeri. Indonesia dengan memiliki luas wilayah 1.904.569 km², sehingga masih sulit dilakukan kontrol pemerintah untuk menjangkau seluruh area di pelosok Nusantara. Namun dengan adanya Otonomi Daerah beban Pemerintah Pusat berkurang karena kini Daerah juga diberikan wewenang untuk mengatur dan membangun Daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pembentukan daerah terdiri dari 2 (dua) bentuk berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah bersandingan dan pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Permasalahan yang mendasar di Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan

¹ Drs . H. Syaekani, HR. Otonomi Daerah *Dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset 2012) Hal. 217-218

pemekaran dan penataan wilayah administratif Kecamatan di wilayah Kabupaten Lamandau antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah 6.414 Km²;
2. Sebagai syarat fisik pembentukan Kabupaten baru;
3. Tidak meratanya penyebaran penduduk;
4. Perkembangan pembangunan yang belum merata di desa-desa yang jauh dari ibukota kecamatan;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan public

Dari beberapa alasan dalam latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini difokuskan pada Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pendidikan di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten lamandau, Kalimantan Tengah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendidikan di Kecamatan Bulik Timur?

Otonomi Daerah

Reformasi membuka jalan bagi setiap orang untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya dan pelayanan. Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru selama 32 tahun ternyata telah banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain pendapatan antar daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat, kesenjangan regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Otonomi Daerah merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan setiap Daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan rakyat².

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan wewenang daerah yang diberikan bertujuan untuk mengetahui dan mengurus Pemerintahan dan kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri. Tidak hanya mengurus dan memberikan kebutuhan masyarakat semata namun pemekaran wilayah juga memberikan kesempatan dalam Pembentukan Daerah. Dasar dari Pemekaran wilayah juga diatur

²SrijantiRahmandan HI Purwanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba EmpatHal 187

melalui undang-undang, yaitu UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 2 (1) yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintah Daerah”.

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatkan pelayanan publik guna meperlancar terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai sarana pendidik politik di tingkat lokal untuk itu untuk membentuk suatu daerah mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah
3. Luas wilayah dengan mempertimbangkan dari aspek sosial budaya, sosial politik, pertanahan dan keamanan.

Kebijakan Pemerintah Era Otonomi Daerah

Pemberlakuan undang-undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberi lampu hijau terhadap masyarakat dengan melihat tujuan utama otonomi daerah yakni menyejahterakan masyarakat memungkinkan bahwa pembangunan wilayah dalam harapan yang lebih positif dengan mengacu luasnya wawasan yang demokratis terhadap masyarakat. Termasuk pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah.

Pemberlakuan undang – undang 22 tahun 1999 tidak semata pengelolaan pembangunan fisik daerah otonomi namun menuntut pengelolaan pendidikan dri yang bersifat sentralistik kepada lebih bersifat desentralistik. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pendidikan sangat berperan penting sebagai bentuk Pemerintah terhadap pendidikan bangsa.

PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, melalui wawancara dengan beberapa narasumber dilapangan untuk memperoleh analisis untuk memperoleh gambaran Dampak Pemekaran wilayah Terhadap Pendidikan Di Kecamatan Bulik Timur, Kalimantan Tengah.

Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendidikan di Kecamatan Bulik Timur

1. Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Kecamatan Bulik Timur

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dilihat dari banyaknya unit meliputi jumlah gedung sekolah, taman baca, pondok pesantren, akademi/perguruan tinggi, dan fasilitas lain yang menyokong jalannya pendidikan di Kecamatan Bulik Timur. Kecamatan Bulik Timur hingga

kini tercatat hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga tingkat SMA/ sederajat dan fasilitas penunjang lain berupa kantor Unit Pengawas Sekolah/PLS. Kecamatan Bulik Timur resmi dimekarkan dan berdiri sebagai satuan wilayah administratif sendiri pada tahun 2006. Sebelum dimekarkan, namun tidak banyak fasilitas pendidikan yang terdapat di wilayah ini. Hanya memiliki 12 Sekolah Dasar untuk menempuh pendidikannya di tingkat SMP atau SMA harus tinggal di ibukota kabupaten yakni Nangabulik atau bahkan di kota lain. Biasanya mereka memanfaatkan keberadaan sanak familinya untuk menumpang tempat tinggal.

2. Jarak Tempuh Menuju Fasilitas Pendidikan

Jarak tempuh merupakan salah satu indikator akses yang penting. Suatu fasilitas dengan jarak tempuh yang pendek dan singkat akan lebih menghemat tenaga, biaya, dan waktu sehingga siswa yang akan menuju sekolah masih memiliki energi yang cukup untuk melaksanakan pendidikannya di sekolah. Dengan begitu, materi pembelajaran akan lebih mudah diserap karena siswa masih berada dalam keadaan yang optimal.

Sebelum dilakukan pemekaran, semua desa di Kecamatan Bulik Timur telah memiliki fasilitas pendidikan minimal yakni Sekolah Dasar (SD). Kini setelah pemekaran, SD yang berada di kawasan wilayah Bulik Timur terdiri dari 13 SD Negeri dan 2 SD Swasta yakni SDS Karda Traders dan SDS Sawit Multi Utama. Kedua SD Swasta ini dibangun dengan tujuan untuk mempermudah anak-anak dari pekerja di perusahaan tersebut untuk bersekolah mengingat umumnya perusahaan kelapa sawit berlokasi di tengah-tengah perkebunan sehingga akan menyulitkan siswa untuk bersekolah.

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) kini Kecamatan Bulik Timur telah memiliki 6 (enam) SMP yang semuanya berstatus Negeri. Letak dari sekolah-sekolah ini disesuaikan dengan persebaran penduduk dan desanya. Yang menarik disini adalah keberadaan seluruh SMP di wilayah ini belum memiliki jumlah peserta didik yang besar. Peserta didik terbanyak berada di SMP N 3 Bulik Timur yang berlokasi di Desa Bukit Jaya dan yang paling sedikit adalah SMP N Satap 6 Bulik Timur yang hanya memiliki 20 siswa

Jumlah peserta didik yang variatif ini umumnya disebabkan karena jumlah penduduk masing-masing desa yang berbeda. Sebagai contoh adalah SMP N 2 Bulik Timur yang berlokasi di Desa Sungkup. Desa Sungkup pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebanyak 500 jiwa. Selain itu letak Desa Sungkup cukup jauh dari desa lainnya. Desa terdekat dari Desa

Sungkup adalah Desa Nanga Koring yang berjarak sekitar lima kilometer. Namun dilihat dari geografisnya, Desa Nanga Koring letaknya lebih dekat dengan Desa Toka. Desa Toka juga telah memiliki SMP N Satap 4 yang menjadikan siswa-siswi dari Desa Nanga Koring lebih suka bersekolah di SMP N Satap 4 Desa Toka.

3. Tingkat Kelulusan

Dilihat dari kuantitas lulusannya, Kecamatan Bulik Timur masih mengalami tingkat kelulusan yang fluktuatif. Tingkat kelulusan merupakan salah satu tolok ukur bagaimana kualitas pendidikan di kawasan tersebut. Tingkat kelulusan ini juga menjadi bahan evaluasi Dinas Dikjar agar senantiasa memperhatikan pendidikan di kawasan tersebut. Dilihat dari proporsinya, dari sebelum pemekaran hingga setelah pemekaran belum tampak perbedaan yang mencolok antara sebelum dan sesudah pemekaran. Angka dan tingkat kelulusan dapat dikatakan relatif baik. Angka proporsi lulusan terbaik adalah pada tahun ajaran 2011/2012 dimana semua siswa di tiap tingkatan lulus Ujian Akhir Nasional. Meskipun begitu, nilai yang didapatkan oleh tiap-tiap siswa beragam dan harus senantiasa ditingkatkan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di sekolah yang diinginkan.

4. Ketersediaan Transportasi Umum

Sebagai daerah yang memiliki kontur perbukitan, rawa, sungai, dan daratan Kecamatan Bulik Timur juga memiliki moda transportasi umum yang beragam untuk menjangkau tiap-tiap daerah. Mode transportasi umum yang paling banyak digunakan adalah ojek, perahu kelotok dan perahu sampan. Perahu kelotok ialah perahu kecil yang dijalankan dengan mesin berbahan bakar solar dan perahu sampan yang dijalankan dengan menggunakan tenaga manusia. Selain itu, sebelum pemekaran dilakukan masih ada 10 desa yang belum bisa dilalui dengan truk atau *pick up*. Sehingga untuk mengirimkan ke daerah tersebut harus melalui mode fasilitas lain seperti perahu kelotok dan ojek karena pada saat itu belum dibangun jalan keras yang dapat dilalui menggunakan truk dan *pick up* guna mengakses desa yang berada di pinggiran daerah.

5. Biaya Transportasi

Biaya transportasi untuk mengakses fasilitas pendidikan di Kecamatan Bulik Timur relatif bervariasi. Untuk mengakses Sekolah Dasar terhitung paling murah karena di tiap desa sudah ada Sekolah Dasar yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau bersepeda. Sedangkan

untuk mengakses SMA/Sederajat rata-rata siswa lebih memilih untuk tinggal di rumah sanak saudaranya atau tinggal di rumah kos yang berdekatan dengan jarak sekolahnya. Memang hal ini jauh lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga apabila dibandingkan dengan melakukan perjalanan darat setiap harinya. Disamping memerlukan biaya besar, ritme ini bisa menjadi hal yang sangat melelahkan.

“Saya tinggal dengan keluarga sepupu saya disini (Bukit Jaya) daripada harus menempuh perjalanan pulang pergi. Jadi kita nggak capek, dapat beristirahat dan belajar dengan nyaman dan aman.”³

6. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Dampak pemekaran terhadap kehidupan sosial yang diteliti dalam penelitian ini adalah akibat-akibat yang dirasakan masyarakat terhadap kehidupan sosial mereka. Khususnya mengenai ketersediaan prasarana pendidikan serta akses dan transportasi menuju fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Bulik Timur.

PENUTUP

Simpulan

1. Fasilitas pendidikan (Sekolah, Kantor, Perpustakaan) lebih banyak dibangun pasca pemekaran sehingga masyarakat lebih mudah mengakses dan menjangkaunya.
2. Tingkat kelulusan sudah cukup baik, bahkan pada masa pra pemekaran. Tingkat kelulusan terbaik terjadi pada tahun 2011/2012 dimana semua siswa di tiap tingkatan lulus 100 persen.
3. Akses jalan raya mulai dibangun pasca pemekaran sehingga masyarakat lebih mudah melakukan mobilitas, termasuk para siswa dalam mengakses sekolahnya. Namun sebagian besar jalan yang berada di wilayah itu masih berupa jalan tanah yang hanya dapat dilewati di waktu-waktu tertentu.
4. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas transportasi umum, jalan yang keadaannya masih buruk, terbatasnya kapasitas dan kuantitas guru (khususnya

³Wawancara dengan Aditya, siswa SMK 1 Bulik Timur asal Desa Nuangan pada tanggal 18 September 2014 pukul 15.00

untuk pelajaran Matematika, IPA, dan bahasa asing), serta ketiadaan listrik yang menghambat siswa dalam beraktualisasi menggunakan sarana pendukung proses belajar mengajar seperti laboratorium dan IT.

Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih banyak melakukan perbaikan infrastruktur publik di kawasan ini seperti jalan raya mengingat jalan raya merupakan salah satu elemen utama untuk mendukung mobilitas dan akselerator perkembangan daerah.
2. Pemerintah seharusnya lebih mengupayakan ketersediaan angkutan massal sebagai sarana pembantu masyarakat melakukan mobilitas, termasuk diantaranya adalah para siswa untuk mengakses sekolahnya.
3. Pemerintah harus menyediakan listrik hingga ke pelosok daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk para siswa, ketiadaan listrik mengakibatkan kurangnya aktualisasi penggunaan IT dalam proses pembelajaran dan fasilitas pendukung lain seperti laboratorium menjadi mubazir.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi.
2. Kecamatan Bulik Timur memiliki jarak yang cukup jauh dengan Kota Nanga Bulik dan akses yang tidak mudah sehingga cukup menyulitkan peneliti untuk menjangkau daerah tersebut.
3. Keterbatasan waktu dan biaya
4. Informan yang sulit ditemui karena beberapa sudah memiliki agenda tersendiri dan kadang kala informan menyampaikan informasi secara berbelit-belit.

Daftar Pustaka